

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perkembangan Bank Syariah

Pada tahun 1963 Ahmad El Najjar mendirikan sebuah bank simpan pinjam yang berbasis bagi hasil di kota Mit Ghamr, Mesir. Bank ini menerapkan konsep tanpa bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk kerja sama dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Bank inilah menjadi cikal bakal munculnya bank syariah dan mengalami perkembangan, sehingga sampai tahun 1967 sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir.¹¹²

Langkah Mit Ghamr mendirikan berbasis bagi hasil ternyata memberikan inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1975 disponsori oleh 22 negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu untuk mendirikan bank Islam di negara masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Hingga sekarang *Islamic Development Bank* (IDB) yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi telah memiliki lebih dari 43 negara.¹¹³

Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975) di Uni Emirat Arab, Faisal Islamic Bank of Sudan (1977) di Sudan, Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) di Mesir, serta Kuwait Finance House (1977), di Kuwait. Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha

¹¹² Antonio, *Bank Syariah*, h. 18.

¹¹³ *Ibid.*, h. 23.

muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal.¹¹⁴

Islamic Development Bank (IDB) kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian diikuti oleh Bank Syariah Mandiri yang mendapat izin operasional pada tahun 1999 dari Bank Indonesia. Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN).¹¹⁵

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bank swasta nasional: Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Tbk).¹¹⁶ Jika dibandingkan dengan negara lain, respon Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sangat terlambat. Wacana pembentukan sistem ekonomi syariah mungkin telah didengungkan pada awal tahun 1980 sebagai alternatif sistem ekonomi kapitalis. Namun tindakan yang dilakukan untuk membentuk sistem ekonomi tersebut serta membawa sistem ekonomi syariah ke dalam tatanan praktis tidak mendapat kemajuan yang berarti.

Keterlambatan Indonesia dalam membangun ekonomi syariah dapat disimpulkan dengan melihat komparasi antar negara yang telah lebih dahulu mendirikan lembaga keuangan syariah antara lain Mesir (1963, Islamic Ghmar Bank), Uni Emirat Arab (1975, Dubai Islamic Bank), Kuwait (1977, Kuwait

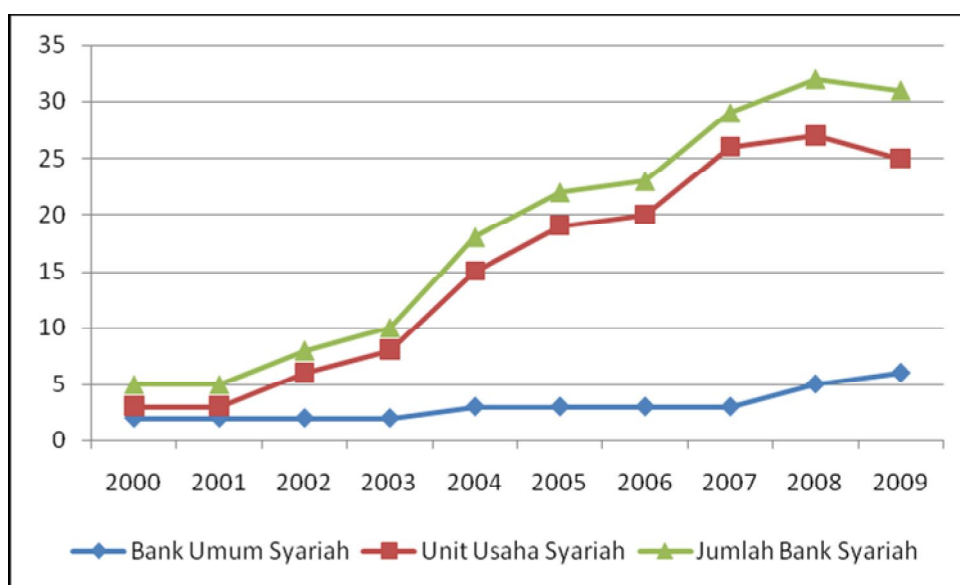
¹¹⁴ *Ibid.*, h. 23-26.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 25-26.

¹¹⁶ Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah: Desember 2009", www.bi.go.id, diunduh 24 September 2010 jam 22.20.20, h. 1.

Finance House), Siprus (1983, Faisal Islamic Bank of Kibris), Malaysia (1983, Bank Islam Malaysia Berhad), dan Turki (1984, Daar al-Maal al-Islami & Faisal Finance Institution).

Pembentukan bank syariah yang pertama sekali di Indonesia terjadi lebih kurang sepuluh tahun sejak wacana pembentukan bank syariah dilakukan pada awal tahun 1980. Pendirian bank syariah ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pihak-pihak lain. Prakarsa tersebut berhasil membentuk PT. Bank Muamalat Indonesia yang ditandatangani pada 1 November 1991. Hingga saat ini (2010), terdapat tiga Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia. Komposisi ini dilengkapi dengan dua puluh delapan (28) Unit Usaha Syariah (UUS). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel sebagai berikut:



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia.¹¹⁷

Gambar 15
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah

¹¹⁷ *Ibid.*

Tabel 4
Perkembangan Perbankan Syariah

Keterangan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Bank Umum Syariah										
- Jumlah bank	2	2	2	2	3	3	3	3	5	6
- Jumlah kantor	57	86	105	209	266	304	349	401	581	711
Unit Usaha Syariah										
- Jumlah bank	3	3	6	8	15	19	20	26	27	25
- Jumlah kantor	10	15	31	56	89	154	183	196	241	287
Total bank	5	5	8	10	18	22	23	29	32	31
Total kantor	67	101	136	265	355	458	632	597	822	998

Sumber: diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia.¹¹⁸

Tabel 4 memperlihatkan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) mengalami pertumbuhan yang perlahan, hanya pada tahun 2008-2009 ada penambahan jumlah bank, tetapi jumlah kantor pelayanannya terlihat cukup tinggi di mana setiap tahunnya mengalami penambahan. Sedangkan pada Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari bank konvensional perkembangannya tergolong lumayan cepat, begitu juga dengan jumlah kantor pelayanannya.

Pada tahun 2009 terlihat adanya penurunan jumlah bank dari Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional yang pada tahun sebelumnya (2008) berjumlah sementara pada tahun berikut (2009) berjumlah 25, hal ini disebabkan oleh ada beberapa bank konvensional menggabungkan diri dengan bank konvensional lainnya, selain itu ada juga dari Unit Usaha Syariah (UUS) yang berubah status menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Adapun tahapan pengembangan perbankan syariah di Indonesia sebagai berikut:

- a. Tahun 1990, rekomendasi lokakarya Majelis Ulama Indonesia untuk mendirikan lembaga perbankan syariah.

¹¹⁸ *Ibid.*

- b. Tahun 1992, masuknya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia dengan dimungkinkannya suatu bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil (UU No.7 Tahun 1992).
- c. Tahun 1992, beroperasinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah (BUS) untuk pertama kali.
- d. Tahun 1998, dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*), dengan dimungkinkannya bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UU. No.10 Tahun 1998).
- e. Tahun 1998, penegasan peranan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan perbankan syariah dan dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah (UU No. 23 Tahun 1999).
- f. Tahun 1999, diberlakukannya ketentuan kelembagaan bank syariah yang pertama sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah.
- g. Tahun 1999, beroperasinya Bank Syariah Mandiri (BSM)
- h. Tahun 2000, diterapkannya instrument keuangan syariah yang pertama kali dan menandai dimulainya kegiatan di pasar keuangan antarbank dan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.
- i. Tahun 2001, dibentuknya satu kerja khusus (Biro Perbankan Syariah) di Bank Indonesia yang menangani pengembangan perbankan syariah secara komprehensif.
- j. Tahun 2002, disusunnya cetak biru pengembangan perbankan syariah.
- k. Tahun 2003, disusunnya naskah akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) perbankan syariah.
- l. Tahun 2003, diberlakukannya ketentuan kehati-hatian yang pertama sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah, yaitu Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) bagi bank syariah.
- m. Tahun 2003, dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- n. Tahun 2004, disusunnya ketentuan persyaratan, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS).

- o. Tahun 2005, diberlakukannya ketentuan permodalan yang khusus bagi perbankan syariah yang telah sesuai dengan standar internasional atau IFSB.
- p. Tahun 2005, penjajakan ketentuan jaringan secara lebih efisien dan berhati-hati.
- q. Tahun 2005, inisiatif penyusunan *linkage program* sebagai dasar peran bank syariah dalam optimalisasi *voluntary sector*.¹¹⁹

Sedangkan perkembangan regulasi bagi bank syariah, diuraikan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah menetapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*).
- b. Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan Undang-undang No. 72 Tahun 1992, yang peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia dan dikuatkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Penggunaan istilah bank syariah tegas disebutkan “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah” dan Pasal 1 butir 13 disebutkan berlakunya hukum Islam sebagai dasar transaksi di perbankan syariah.
- c. Teknis operasional produk dan transaksi syariah yang digunakan pada bank syariah diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- d. Eksistensi bank syariah diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memungkinkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.
- e. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹²⁰

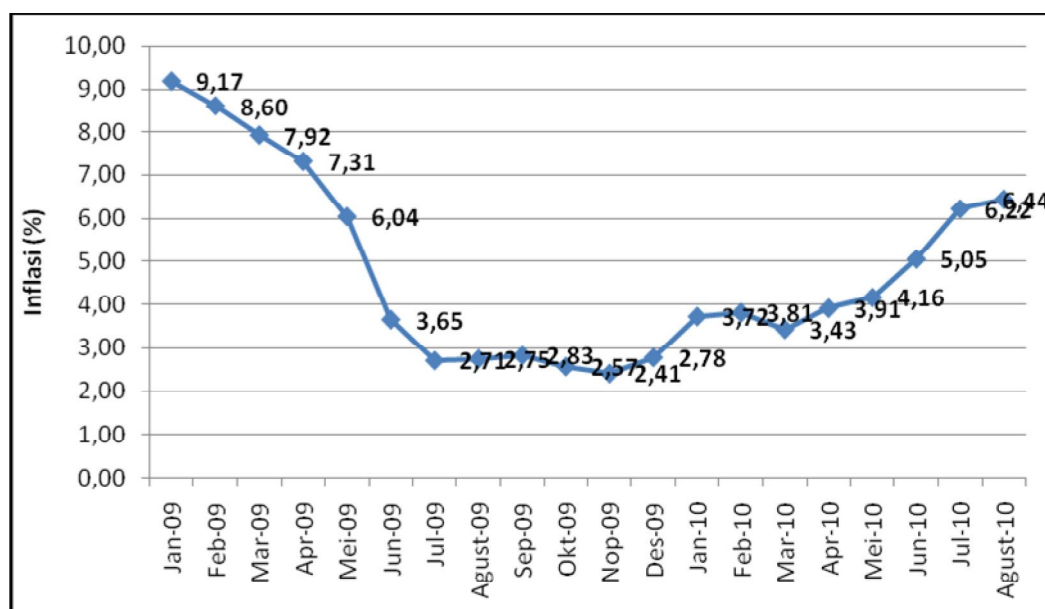
Berdasarkan uraian tersebut tahapan perkembangan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan setiap tahunnya. Pemerintah terus mengupayakan pengembangan perbankan syariah melalui kebijakan-kebijakan baik melalui undang-undang maupun kebijakan moneter yang terus mengalami perkembangan dan pembaharuan.

¹¹⁹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah.*, h. 20-21.

¹²⁰ *Ibid.*, h. 21.

2. Inflasi

Indikator yang digunakan Bank Indonesia untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Data inflasi diperoleh dari Bank Indonesia situs www.bi.go.id. Data inflasi yang diperoleh berbentuk data bulanan. Pada awal periode pengamatan (Januari 2009) sebesar 9,17%, periode selanjut mengalami penurunan, tetapi pada akhir periode pengamatan mengalami peningkatan hingga mencapai 6,44%. Berikut ini disajikan perkembangan inflasi setiap bulannya selama periode penelitian.



Sumber: Diolah dari Bank Indonesia.¹²¹

Gambar 16
Pergerakan Inflasi di Indonesia

Untuk lebih rinci mengenai perkembangan inflasi di Indonesia selama periode pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

¹²¹ Diolah dari www.bi.go.id.

Tabel 5
Pergerakan Inflasi di Indonesia

Periode	Tingkat Inflasi
Januari 2009	9,17
Februari 2009	8,60
Maret 2009	7,92
April 2009	7,31
Mei 2009	6,04
Juni 2009	3,65
Juli 2009	2,71
Agustus 2009	2,75
September 2009	2,83
Oktober 2009	2,57
Nopember 2009	2,41
Desember 2009	2,78
Januari 2010	3,72
Februari 2010	3,81
Maret 2010	3,43
April 2010	3,91
Mei 2010	4,16
Juni 2010	5,05
Juli 2010	6,22
Agustus 2010	6,44

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia.¹²²

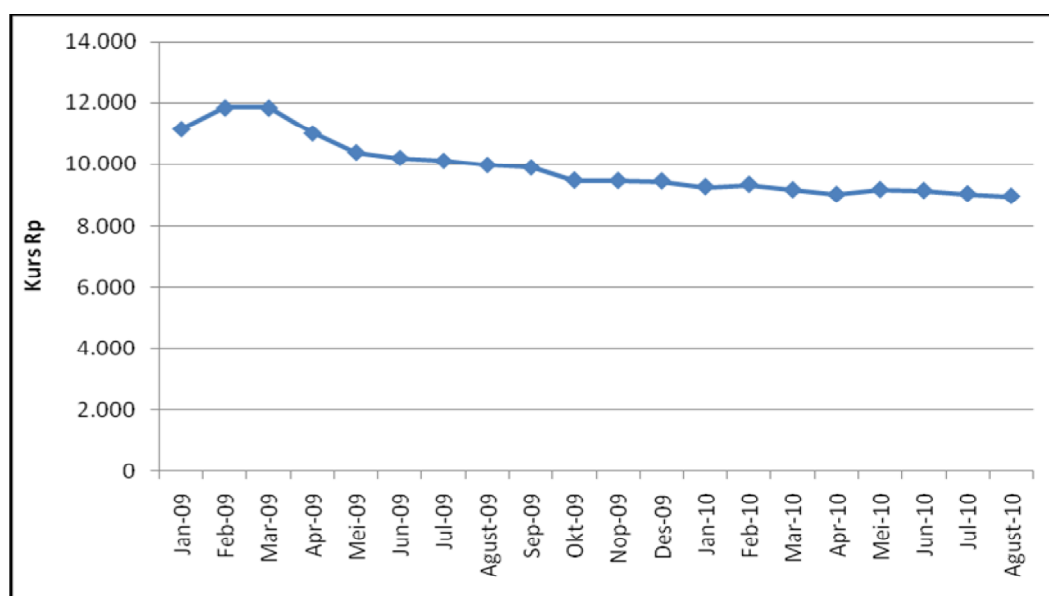
Tingkat inflasi yang terjadi selama periode pengamatan belum mencapai 10%. Pada tahun 2009 rata-rata inflasi mengalami penurunan terutama di awal-awal tahun hingga pertengahan, penurunan terjadi hingga Juli 2009, dan berfluktuasi mulai Agustus s.d. Desember 2009. Berbeda dengan tahun 2010, di mana inflasi cenderung meningkat hingga mencapai 6,44% pada Agustus 2010, penurunan inflasi pada tahun ini hanya terjadi pada bulan Maret 2010. Dari tabel dan grafik di atas, selama periode pengamatan (Januari 2009 s.d. Agustus 2010) tingkat inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2009 yaitu sebesar 9,17%, sedangkan inflasi terendah terjadi pada bulan Nopember 2009 sebesar 2,41%. Secara teoritis berdasarkan parah tidaknya inflasi tersebut dapat digolongkan menjadi inflasi ringan (di bawah 10% setahun), inflasi sedang (antara 10%-30% setahun), inflasi berat (antara 30%-100% setahun), dan hiperinflasi (di atas 100%

¹²² *Ibid.*

setahun). Berdasarkan tingkat lonjakan inflasi yang bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia selama Januari 2009 s/d Agustus 2010 tergolong inflasi ringan, karena tingkat inflasi yang ada masih berada di bawah 10%.

3. Kurs Rupiah

Kurs Rupiah yang dimaksud merupakan nilai USD 1 terhadap Rupiah. Kurs rupiah pada penelitian ini diperoleh dari Bank Indonesia melalui situs www.bi.go.id. Data kurs dalam bentuk harian, dimana data kurs yang dipublikasikan Bank Indonesia berdasarkan hari kerja sementara penelitian ini menggunakan data bulanan. Untuk mengubah data kurs menjadi data bulanan, penulis mengambil atau menggunakan nilai tengah dari nilai tukar antara pembukaan dengan penutupan, kemudian kurs harian tersebut dirata-rata untuk memperoleh nilai kurs Rupiah setiap bulannya. Selama periode pengamatan (Januari 2009 sampai dengan Agustus 2010) kurs Rupiah terhadap US Dollar berkisar antara Rp 8,972 hingga Rp 11.853, dan cenderung mengalami penurunan periode berikutnya, seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Diolah dari Bank Indonesia.¹²³

Gambar 17
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar

¹²³ *Ibid.*

Untuk lebih rinci mengenai perkembangan kurs Rupiah terhadap US Dollar selama periode pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar

Periode	Kurs Rupiah (X_2) (Rp)	$\ln X_2$
Januari 2009	11.167	9,32
Februari 2009	11.853	9,38
Maret 2009	11.850	9,38
April 2009	11.025	9,31
Mei 2009	10.393	9,25
Juni 2009	10.207	9,23
Juli 2009	10.111	9,22
Agustus 2009	9.978	9,21
September 2009	9.901	9,20
Oktober 2009	9.483	9,16
November 2009	9.470	9,16
Desember 2009	9.458	9,15
Januari 2010	9.275	9,14
Februari 2010	9.348	9,14
Maret 2010	9.174	9,12
April 2010	9.027	9,11
Mei 2010	9.183	9,13
Juni 2010	9.148	9,12
Juli 2010	9.049	9,11
Agustus 2010	8.972	9,10

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia.¹²⁴

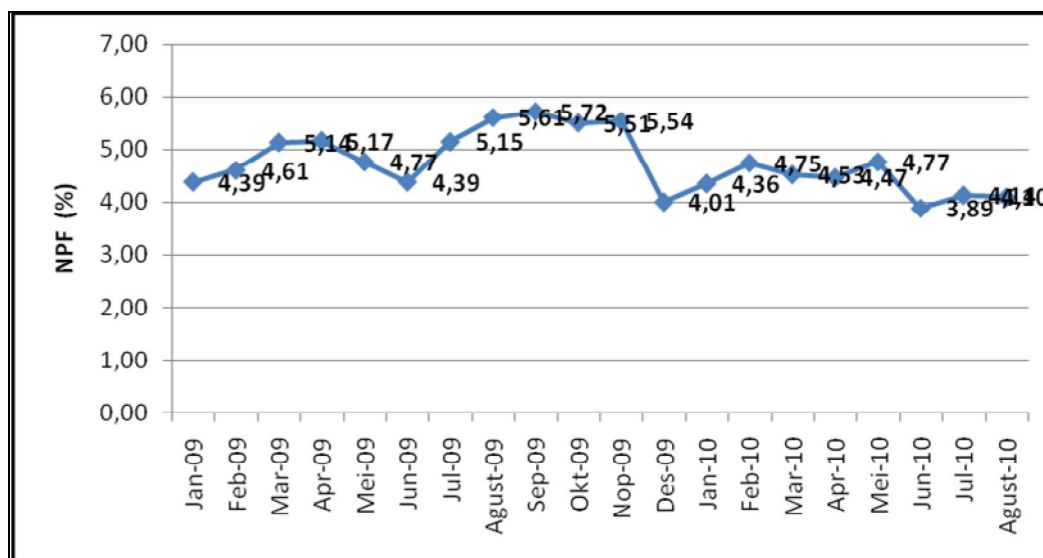
Selama tahun 2009 kurs Rupiah terhadap US Dollar berkisar antara 9-11 ribu Rupiah, dan Rupiah cenderung mengalami penurunan, peningkatan hanya terjadi pada bulan Februari. Sedangkan pada Januari s.d. Agustus 2010 kurs Rupiah terhadap US Dollar berkisar antara 8-9 ribu Rupiah, dan pergerakannya berfluktuatif, sempat terjadi peningkatan pada bulan Februari dan Mei. Selama periode penelitian, nilai kurs Rupiah terhadap US Dollar cenderung mengalami penurunan. Selama periode pengamatan kurs Rupiah terhadap US Dollar tertinggi pada bulan Februari 2009 sebesar Rp 11.853 dan terendah pada bulan Agustus 2010 sebesar Rp 8.972.

¹²⁴ *Ibid.*

4. *Non Performing Financing* (NPF)

Non performing financing (NPF) adalah kemampuan bank dalam mengumpulkan/menarik kembali margin bagi hasil dan pokok pembiayaan yang disalurkan. *Non performing financing* juga menunjukkan kemampuan bank syariah untuk mengelola pembiayaannya. Indikator pengukuran *Non performing financing* berdasarkan pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bermasalah terdiri atas pembiayaan tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam penelitian ini *Non performing financing* perbankan syariah yang digunakan adalah yang tersedia dan dipublikasikan pada situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) melalui Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan setiap bulannya.

Non performing financing perbankan syariah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan *non performing financing* Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Selama periode pengamatan (Januari 2009 sampai dengan Agustus 2010) *non performing financing* perbankan syariah berfluktuasi yang berkisar antara 3,89% hingga 5,72%, seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Diolah dari Bank Indonesia.¹²⁵

Gambar 18
Perkembangan NPF Perbankan Syariah

¹²⁵ Bank Indonesia, "Statistik Perbankan",

Untuk lebih jelas tentang perkembangan *Non performing financing* (NPF) perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
NPF Perbankan Syariah

Periode	NPF Perbankan Syariah (%)
Januari 2009	4,39
Februari 2009	4,61
Maret 2009	5,14
April 2009	5,17
Mei 2009	4,77
Juni 2009	4,39
Juli 2009	5,15
Agustus 2009	5,61
September 2009	5,72
Oktober 2009	5,51
Nopember 2009	5,54
Desember 2009	4,01
Januari 2010	4,36
Februari 2010	4,75
Maret 2010	4,53
April 2010	4,47
Mei 2010	4,77
Juni 2010	3,89
Juli 2010	4,14
Agustus 2010	4,10

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia.¹²⁶

Pada tahun 2009 NPF perbankan syariah cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun berikutnya, pada tahun ini NPF berkisar antara 4-5%, tertinggi sempat mencapai 5,72% pada bulan September dan terendah sebesar 4,01%. Selama periode Januari s.d. Desember 2009 perbankan syariah belum mampu memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia, di mana NPF tidak boleh melebihi dari 5%. Sedangkan untuk periode Januari s.d. Agustus 2010 NPF

¹²⁶ *Ibid.*

perbankan syariah berkisar antara 3-4%, sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada periode ini NPF perbankan syariah tertinggi mencapai 4,75% pada bulan Februari dan terendah sebesar 3,89% pada bulan Juni. Selama periode Januari s.d. Agustus 2010 perbankan syariah telah memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia, di mana NPF tidak boleh melebihi dari 5%.

B. Pembahasan

1. Uji Statistik

Tujuan penelitian ini untuk membuktikan pengaruh inflasi (X_1) dan kurs rupiah ($\ln X_2$) baik secara parsial maupun simultan terhadap *non performing financing* (Y). Pengujian pengaruh tersebut menggunakan uji-t, dan uji-F dan uji R (regresi). Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini terdiri dari inflasi (X_1) dan kurs (X_2). Berhubung data yang digunakan ada yang dalam bentuk satuan Rupiah (dana pihak ketiga) dan dalam bentuk persen (FDR, SBI, dan NPF), sehingga diperlukan penyamaan nilai tiap variabel yang berbeda-beda, selain itu untuk memudahkan estimasi yang lebih efisien, serta mengurangi resiko terkena multikolinearitas, maka model penelitian ditransformasi ke dalam model Log. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh secara parsial/terpisah inflasi (X_1), kurs (X_2) terhadap *non performing financing*/NPF (Y). Pengujian ini menggunakan uji-t, dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

- a. H_0 : Tidak ada pengaruh inflasi terhadap *non performing financing*.
 H_a : Ada pengaruh inflasi terhadap *non performing financing*.
- b. H_0 : Tidak ada pengaruh kurs terhadap *non performing financing*.
 H_a : Ada pengaruh kurs terhadap *non performing financing*.

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut menggunakan kriteria yaitu jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan menerima H_0 . Sedangkan jika menggunakan probabilitas, jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a , sedangkan jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Pengujian

ini menggunakan aplikasi SPSS 15.0 *for Windows*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Pengujian Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7,110	2,353		-3,022	,008
	LnX1	-,207	,053	-,779	-3,915	,001
	LnX2	,975	,260	,746	3,744	,002

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Berdasarkan tabel 8 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{LnY} = a + b \text{LnX}_1 + b \text{LnX}_2 + e$$

$$\text{LnY} = (-7,110) - 0,207\text{LnX}_1 + 0,975\text{LnX}_2 + e$$

$$\text{SE} = (2,353) (0,053) (0,260)$$

$$t = (-3,022) (-3,915) (3,744)$$

$$\text{Sig.} = (0,008) (0,001) (0,002)$$

$$F = 9,496$$

$$\text{DW} = 1,780$$

Konstanta sebesar -7,110 menyatakan bahwa jika tingkat inflasi (LnX_1), kurs Rupiah terhadap US Dollar (LnX_2) bernilai tetap, maka *non performing financing* (LnY) perbankan syariah akan bernilai tetap yaitu sebesar -7,110. Dari persamaan regresi linier berganda tersebut diperoleh tren masing-masing variabel sebagai berikut:

- Koefisien regresi inflasi sebesar -0,207, berarti setiap peningkatan inflasi sebesar 1% akan menurunkan *non performing financing* sebesar 0,207%.
- Koefisien regresi kurs sebesar 0,975 berarti setiap peningkatan nilai kurs Rupiah atas US Dollar sebesar 1% akan meningkatkan *non performing financing* sebesar 0,975%.

Hasil *print out* komputer dengan mempergunakan program SPSS 15 diperoleh hasil inflasi yang terjadi memiliki tanda koefisien regresi sebesar -0,207. Nilai koefisien regresi sebesar -0,207 memberi kesan apabila tingkat inflasi meningkat sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia sebesar 0,207%. Nilai statistik (t hitung) sebesar -3,915 dan probabilitas (Sig.) sebesar 0,001. Sementara harga t-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 20 dengan taraf signifikansi 5% dan $dk = n - 2 = 18$, diperoleh t tabel sebesar 2,101. Jika harga t-hitung dibandingkan dengan harga t-tabel, maka diperoleh bahwa:

$LnX_1 : 3,915 > 2,101$: H_0 ditolak dengan menerima H_a

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), diperoleh sebagai berikut:

$LnX_1 : 0,008 < 0,05$: H_0 ditolak dengan menerima H_a

Berdasarkan ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis, maka diperoleh keputusan bahwa inflasi memberikan pengaruh nyata terhadap *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia 95%, atau $\alpha = 0,05$. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa:

H_0 : Tidak ada pengaruh inflasi terhadap *non performing financing*.

H_a : Ada pengaruh inflasi terhadap *non performing financing*.

Hasil *print out* komputer dengan mempergunakan program SPSS 15 diperoleh kurs yang terjadi memiliki tanda koefisien regresi sebesar 0,975. Nilai koefisien regresi sebesar 0,975 memberi kesan apabila kurs Rupiah atas US Dollar meningkat sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia sebesar 0,975%. Nilai statistik (t hitung) sebesar 3,744 dan probabilitas (Sig.) sebesar 0,002. Sementara harga t-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 20 dengan taraf signifikansi 5% dan $dk = n - 2 = 18$, diperoleh t tabel sebesar 2,101. Jika harga t-hitung dibandingkan dengan harga t-tabel, maka diperoleh bahwa:

$LnX_2 : 3,744 > 2,101$: H_0 ditolak dengan menerima H_a

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), diperoleh sebagai berikut:

$\text{LnX}_1 : 0,002 < 0,05$: H_0 ditolak dengan menerima H_a

Berdasarkan ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis, maka diperoleh keputusan bahwa kurs memberikan pengaruh nyata terhadap *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia 95%, atau $\alpha = 0,05$. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa:

H_0 : Tidak ada pengaruh kurs terhadap *non performing financing*.

H_a : Ada pengaruh kurs terhadap *non performing financing*.

Sedangkan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama inflasi (LnX_1) dan kurs (LnX_2) terhadap profitabilitas (LnY). Dengan menggunakan hipotesis yaitu:

H_0 : tidak ada pengaruh inflasi dan kurs terhadap *non performing financing*.

H_a : ada pengaruh inflasi dan kurs terhadap *non performing financing*.

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis menggunakan kriteria yaitu:

- Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak.
- Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka H_0 tidak dapat ditolak.

Atau dapat juga berdasarkan probabilitas:

- Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak dapat ditolak.
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

Hasil pengujian diperoleh hasil yaitu:

Pengujian ini menggunakan aplikasi komputer SPSS 15.0 *for Windows*, diperoleh hasil yaitu:

Tabel 9
Hasil Pengujian Uji-F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,137	2	,069	9,496	,002 ^a
	Residual	,123	17	,007		
	Total	,260	19			

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel 4.6, menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 9,496 dengan probabilitas sebesar 0,002. Sementara harga

F-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 20 dengan taraf signifikansi 5%, dengan dk pembilang atau k (jumlah variabel indenpenden) = 2, serta dk penyebut = 20 ($n - k - 1$) = 17, diperoleh F-tabel sebesar 3,59. Jika harga F-hitung dibandingkan dengan harga F-tabel, maka diperoleh bahwa:

$$9,496 > 3,59 : \text{Ho ditolak dengan menerima Ha}$$

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), diperoleh sebagai berikut:

$$0,002 < 0,05 : \text{Ho ditolak dengan menerima Ha}$$

Berdasarkan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis, dengan melihat hasil pengolahan data tersebut maka diperoleh keputusan bahwa inflasi dan kurs memberikan pengaruh nyata terhadap *non performing financing* perbankan syariah perbankan syariah di Indonesia 95%, atau $\alpha = 0,05$.

Selanjutnya Koefisien Determinasi (R), uji ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel independent dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil pengujian ditambihkan sebagai berikut:

Tabel 10
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,726 ^a	,528	,472	,08494

Sumber: Data diolah, 2010.

Nilai korelasi (R) variabel bebas (inflasi dan kurs) dengan variabel terikat (*non performing financing*/NPF) sebesar 0,726, dengan *R-Square* sebesar 0,528, berarti bahwa *non performing financing*/NPF dapat ditentukan oleh inflasi dan kurs mampu mencapai sebesar 52,8% ($0,528 \times 100\%$) dan sisanya sebesar 47,2% ($100\% - 52,8\%$) ditentukan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Sedangkan nilai *Standard Error of the Estimate* hanya sebesar 0,08367. Nilai tergolong kecil, sehingga model regresi sudah sangat tepat dan layak digunakan.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). BLUE dapat dicapai bila memenuhi Asumsi Klasik. Pada penelitian uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Adapun pengujian yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati normal. Uji ini dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya faktor gangguan yang dapat diketahui melalui uji Jarque-Bera *Normality* (JB test). Formula *Jarque Berra* (JB test) berikut:.

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right]$$

Arti dari notasi n = besar sampel, S = koefisien Skewness dan K = koefisien Kurtosis. Untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya dengan membandingkan nilai $JB_{hitung} = X^2_{hitung}$ dengan nilai X^2_{tabel} , dengan kriteria keputusan sebagai berikut :

- a. Bila nilai $JB_{hitung} > \text{nilai } X^2_{tabel}$, maka berdistribusi normal ditolak.
- b. Bila nilai $JB_{hitung} < \text{nilai } X^2_{tabel}$, maka berdistribusi normal tidak dapat ditolak.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 15 diperoleh nilai-nilai sebagai berikut:

Tabel 10
 Nilai-nilai untuk Perhitungan JB-test

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	20	-1,108	,512	1,035	,992
Valid N (listwise)	20				

Sumber: Data diolah, 2010.

Nilai Skewness sebesar -1,108 dan Kurtosis 1,035. Jika nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam formula JB-test diperoleh sebagai berikut:

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24} \right]$$

$$JB = 20 \left[\frac{-1,108^2}{6} + \frac{(1,035 - 3)^2}{24} \right]$$

$$JB = 20 \left[\frac{1,227664}{6} + \frac{(-4,034)^2}{24} \right]$$

$$JB = 20 \left[\frac{1,227664}{6} + \frac{16,281225}{24} \right]$$

$$JB = 20 [0,204610667 + 0,678384375]$$

$$JB = 20 [0,882995042]$$

$$JB = 17,65990083$$

Berdasarkan hasil estimasi uji Jarque-Bera test di atas, diperoleh nilai Jarque Bera test-statistik sebesar 17,65990083 sedangkan nilai X^2 tabel untuk df 20 dan $\alpha = 0,05$ diperoleh sebesar 31,41043. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai JB test statistik lebih kecil dari nilai X^2 tabel. {JB test hitung (17,65990) < X^2 tabel (31,41043)}, yang berarti model empiris yang digunakan mempunyai residual atau faktor pengganggu yang berdistribusi normal.

Selanjutnya akan disajikan hasil uji multikolinearitas. Adanya masalah multikolinearitas jika terjadi hubungan antar variabel independen maka dinamakan problem multikolinearitas. Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dengan

melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila *Tolerance* lebih besar dari 0,10 (10%) atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 12
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
LnX1	,701	1,427
LnX2	,701	1,427

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Hasil pengujian multikolinearitas diperoleh nilai *Tolerance* variabel Inflasi (LnX₁) memiliki sebesar 0,701 (70,1%) dengan nilai VIF sebesar 1,427, begitu juga dengan Kurs (LnX₂) memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,701 (70,1%) dengan nilai VIF sebesar 1,427. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai *Tolerance* di atas (lebih besar dari) 10% dan nilai VIF di bawah (lebih kecil dari) 10. Oleh karena kedua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 (10%) dengan nilai VIF < 10, maka dapat diputuskan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Terakhir akan disajikan hasil uji autokorelasi. Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode *t* dengan kesalahan pada periode *t*-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik seharusnya bebas dari autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi yaitu dengan melihat besaran Durbin-Watson (D-W) berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi ($du < DW < 4-du$).
- Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif ($DW < dl$).

- c. Bila nilai DW lebih besar dari pada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif ($4-dl < DW$).
- d. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan ($dl < DW < du$).

Hasil pengujian autokorelasi dengan metode Durbin Watson (DW) diperoleh sebagai berikut:

Tabel 13
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,726 ^a	,528	,472	,08494	1,780

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Hasil pengujian autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,780. Sedangkan nilai dl dan du untuk derajat kepercayaan (α) 5% (0,05) dengan jumlah pengamatan (sampel) 20, serta jumlah variabel bebas sebanyak 2, diperoleh du sebesar 1,5367 dan 4-du sebesar 2,4633. Jika nilai dibandingkan dengan ketentuan di atas, maka nilai $DW = 1,780$ berada pada kriteria poin 1 yaitu bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi ($dl < DW < 4-du$). Dengan pembuktian $du < DW < 4-du$ [$1,5367 < 1,780 < 2,4633$].

3. Uji Aprioneri Ekonomik

Hasil pengujian diperoleh bahwa inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah. Hasil pengujian juga menunjukkan selama periode penelitian dari Januari 2009 s.d. Agustus 2010, bahwa setiap penurunan inflasi akan mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) atau sebaliknya setiap peningkatan inflasi perbankan syariah akan mengakibatkan penurunan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah. Dugaan inflasi memiliki pengaruh nyata

terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) terbukti benar. Berdasarkan asumsi ketika inflasi meningkat, kegiatan ekonomi cenderung akan menyesuaikan. Imbas dari kenaikan harga menyebabkan biaya produksi meningkat, nilai uang akan menurun sehingga berakibat pada turunnya produksi dan keuntungan. Imbasnya pada perbankan syariah, pembiayaan yang disalurkan menjadi tidak lancar.

Secara teoritis, inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional.¹²⁷ Hasil penelitian terdahulu juga mendukung hasil penelitian ini. Diantaranya Danastri Sisherdianti, yang melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian diperoleh bahwa setelah krisis moneter (2003-2008) pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) yang ada di Bank Muamalat Indonesia merespon fluktuasi yang terjadi pada variabel inflasi.¹²⁸ Kemudian Yunis Rahmawulan, yang melakukan penelitian pada perbankan syariah di Indonesia. Adapun hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dipengaruhi oleh inflasi pada 3 quarter sebelumnya.¹²⁹ Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus meningkat (Rahardja dan Manurung). Inflasi yaitu, kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar (Sukirno). Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tetapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, aset dan sebagainya). Biasanya diekspresikan sebagai persentase perubahan angka indeks.¹³⁰ Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.¹³¹

¹²⁷ Nopirin, dalam Pratikno, "Pengaruh Nilai", h. 33.

¹²⁸ Sisherdianti, "Faktor-faktor", h. 93.

¹²⁹ Rahmawulan, "Perbandingan Faktor", h. 94.

¹³⁰ Huda, *Ekonomi Makro*, h. 175.

¹³¹ Bank Indonesia, "Pengenalan Inflasi".

Jika dikaitkan dengan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah, berarti adanya permintaan atas barang yang banyak akan mendorong kenaikan inflasi. Berarti kegiatan ekonomi termasuk usaha-usaha yang dibiayai bank syariah akan lebih bergeliat sehingga pengembalian pembiayaan kepada bank syariah menjadi meningkat. Ketika pada satu titik tertentu, dengan terpenuhinya permintaan akan barang, jelas inflasi akan menurun dan kegiatan ekonomi akan melesu, usaha-usaha yang selama ini memperoleh pembiayaan dari bank syariah akan kesulitan mengembalikan pokok pembiayaannya. Sehingga dapat dikatakan menurunnya tingkat inflasi akan meningkatkan NPF perbankan syariah, hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini.

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan *equity effect*, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi dan pendapatan nasional masing-masing disebut dengan *efficiency* dan *output effects*. Efek atas pendapatan (*equity effect*) sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Demikian juga orang yang menumpuk kekayaannya dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi.¹³²

Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan prosentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan prosentase lebih besar dari pada laju inflasi. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. Hal inilah yang mungkin terjadi pada penelitian ini, di mana menurunnya inflasi mempengaruhi kenaikan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*), karena pada golongan tertentu ketika inflasi menurun pendapatan mereka juga menurun sehingga kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan kepada bank syariah menjadi

¹³² Nopirin, dalam Pratikno, "Pengaruh Nilai", h. 33.

menurun dengan kata lain pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) akan meningkat.

Hal yang sama juga terjadi pada efek terhadap efisiensi (*efficiency effects*). Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu akan mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong terjadinya kenaikan produksi barang tertentu. Hal ini mendorong perkembangan usaha-usaha tertentu meningkat dan kemampuan mereka untuk mengembalikan pokok pembiayaan kepada bank syariah juga meningkat. Ketika inflasi menurun kegiatan usaha mereka juga melesu sehingga kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan kepada bank syariah menjadi menurun dengan kata lain NPF meningkat.

Pada efek terhadap output (*output effects*), inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi ini cukup tinggi dapat mengakibatkan penurunan output. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak mempunyai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan output. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output.

Walaupun demikian, pihak pengusaha yang bersifat spekulen akan meningkatkan keuntungan. Mereka memiliki aliran kas yang tinggi walaupun nilainya rendah tetapi kewajibannya atas cicilan pembiayaan bank syariah nilainya tetap, sehingga kemampuan membayar cicilan pembiayaan akan tinggi. Ketika inflasi menurun kegiatan usaha mereka juga melesu, tetapi nilai uang masih lambat untuk menguat, sehingga kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan

kepada bank syariah menjadi menurun dengan kata lain pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) meningkat.

Hasil pengujian diperoleh bahwa inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah. Adanya tingkat pengembalian investasi yang tinggi mempengaruhi jumlah serta arah aliran modal jangka panjang dan jangka pendek. Tingkat pendapatan investasi yang lebih menarik akan mendorong pemasukan modal ke suatu negara. Penawaran valuta asing yang bertambah ini akan meninggikan nilai mata uang negara yang menerima modal tersebut. Di sisi lain usaha-usaha yang ada hubungannya dengan aliran modal tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan usaha sehingga tingkat kelancaran pembiayaan bank syariah mengalami peningkatan, dengan kata lain NPF turun.

Hasil pengujian juga menunjukkan selama periode penelitian dari Januari 2009 sampai dengan Agustus 2010 setiap peningkatan inflasi akan mengakibatkan penurunan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah atau sebaliknya setiap penurunan inflasi akan mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah. Penurunan inflasi akan menurunkan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah meningkat disebabkan faktor ekonomi makro.
- b. Adanya penurunan inflasi mendorong manajemen perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan karena adanya tujuan untuk memaksimalkan imbalan bagi hasil kepada penitip dana. Para manajemen berasumsi kondisi perekonomian yang baik akan mendorong tingkat kelancaran pembiayaan.
- c. Penurunan inflasi berarti harga barang turun sehingga kemampuan masyarakat untuk menabung juga tinggi, sehingga dana pihak ketiga perbankan syariah juga tinggi (kelebihan likuiditas), dan dunia usaha menjadi lebih produktif dengan adanya permintaan dan penawaran atas produk dan jasa.
- d. Penurunan inflasi juga mengakibatkan daya beli masyarakat meningkat, sehingga mendorong deposan memperluas/ekspansi usahanya, karena adanya

permintaan yang meningkat. Kondisi ini mendorong deposan mengajukan pembiayaan dari bank syariah, dan jika tanpa pemikiran dan pertimbangan yang matang akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah meningkat.

Selama periode penelitian dari Januari 2009 sampai dengan Agustus 2010 setiap peningkatan kurs Rupiah akan mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah atau sebaliknya setiap penurunan kurs Rupiah akan mengakibatkan penurunan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah. Adanya pengaruh nilai kurs Rupiah terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ketidاكلancaran pembiayaan pada perbankan syariah bisa juga dipengaruhi oleh variabel ekonomi makro, yang tidak hanya ditentukan oleh perilaku individu deposan maupun ketelitian dan kecermatan bank syariah dalam mengambil keputusan dalam menyalurkan pembiayaan.
- b. Pembiayaan pada umumnya disalurkan pada sektor riil, sehingga ada kenaikan nilai tukar Rupiah yang berdampak terhadap usaha deposan.
- c. Pada sektor usaha tertentu ada kalanya kenaikan nilai tukar Rupiah dapat memberikan kemajuan usaha, karena adanya selisih nilai tukar yang tinggi.

Karena kurs terus berfluktuasi setiap saat, maka nilai penjualan pun akan berpengaruh. Perubahan kurs saat transaksi, pencatatan dan pelaporannya (realisasinya) mengakibatkan terjadinya keuntungan ataupun kerugian dari pertukaran yang akan dicerminkan dalam perhitungan laba rugi pada periode tersebut. Resiko kurs adalah resiko bahwa kurs besok akan berbeda dengan kurs hari ini. Ada tiga ukuran untuk resiko dari kurs, yaitu resiko translasi, resiko transaksi, dan resiko ekonomi.

- a. Resiko translasi. Asset dan kewajiban mata uang asing dianggap beresiko jika nilai mata uang asing untuk tujuan akuntansi diterjemahkan ke dalam mata uang domestik menggunakan kurs saat ini, kurs yang berlaku pada tanggal neraca.

- b. Resiko transaksi. Istilah yang menggambarkan kontrak transaksi valuta asing netto dimana jumlah penyelesaian bisa terkena resiko perubahan kurs. Kontrak piutang, utang dan penjualan atau pembelian dengan harga tetap adalah contoh dimana nilai moneter tetap pada saat yang berbeda dengan saat dimana transaksi sebenarnya diselesaikan.
- c. Resiko ekonomi. Resiko ekonomi terhadap perubahan kurs bergantung pada struktur persaingan pasar untuk bahan baku dan produk perusahaan dan bagaimana pasar ini dipengaruhi oleh perubahan kurs. Pengaruh ini tergantung pada beberapa faktor ekonomi, termasuk elastisitas harga pokok, tingkat persaingan dari pasar asing dan tak langsung melalui pendapatan dan perubahan kurs terhadap pasar itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data maka diperoleh kesimpulan yaitu Tingkat inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah. Hasil pengujian juga menunjukkan selama periode penelitian dari Januari 2009 sampai dengan Agustus 2010 setiap peningkatan inflasi di Indonesia sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) sebesar 0,207 %. Sebaliknya setiap penurunan inflasi di Indonesia sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah di Indonesia sebesar 0,207%.

Nilai kurs Rupiah atas US Dollar berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah. Hasil pengujian juga menunjukkan selama periode penelitian dari Januari 2009 sampai dengan Agustus 2010 setiap peningkatan kurs Rupiah sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) sebesar 0,975%. Sebaliknya setiap penurunan nilai kurs Rupiah sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah di Indonesia sebesar 0,975%.

Secara bersama-sama (simultan), tingkat inflasi dan nilai kurs Rupiah berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah. Selama periode penelitian dari Januari 2007 sampai dengan Desember 2009, menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah dapat ditentukan oleh inflasi dan kurs mencapai 50,3% pada model penelitian ini.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, di mana variabel kurs Rupiah tidak terlalu merespon terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing*

financing) perbankan syariah, maka hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi perbankan syariah untuk terus meningkatkan pembiayaan yang disalurkan.

2. Perbankan syariah tidak perlu terlalu khawatir dengan gejala perekonomian, namun harus mempertimbangkan variabel-variabel lain di luar variabel ekonomi antara lain keimanan, budaya, persaingan, ukhuwah, saling tolong menolong untuk meningkatkan kegiatan penyaluran pembiayaannya.
3. Perbankan syariah harus lebih giat lagi mengadakan penelitian-penelitian yang hasilnya dapat dipakai untuk rujukan pengambilan kebijakan bank, sehingga tujuan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan dapat mencapai hasil yang optimal dan tepat sasaran.
4. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan kepada peneliti lain untuk menambahkan variabel ekonomi makro selain variabel di atas, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam.